

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur dan ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kota Payakumbuh

Maka berdasarkan hasil pengamatan didapatkan beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu:

1. Kantor SAMSAT sendiri terdiri dari tiga instansi yaitu:
  - a. Dinas Pendapatan Daerah dibawah naungan Departemen Dalam Negeri.
  - b. Kepolisian dibawah naungan Departemen Pertahanan Dan Keamanan.
  - c. Jasa Raharja dibawah naungan Departemen Keuangan.

Ketiga instansi ini bekerja sama dalam melayani masyarakat dalam membayar pajak dan bernaung di suatu kantor yang disebut dengan sistem administrasi satu atap (SAMSAT).

2. Adanya kebijakan pajak progresif dapat memberikan efek positif terhadap penerimaan Pajak BBNKB karena akan mendorong wajib pajak untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor karena kalau tidak maka pemilik kendaraan bermotor sebelumnya akan dikenakan pajak progresif dan pemilik kendaraan baru akan mengalami kenaikan pada pajaknya.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak BBNKB serta banyaknya masyarakat yang masih tidak mengetahui prosedur balik nama kendaraan bermotor sehingga petugas harus lebih efisien dan efektif lagi melakukan sosialisasi.

4. Masih adanya kendala yang dirasakan oleh masyarakat seperti lambatnya proses pelayanan dalam pembayaran pajak, sarana dan prasarana yang kurang memadai hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap petugas yang ada dilapangan oleh atasannya.

## 5.2 SARAN

Dari kendala yang dihadapi penulis selama melakukan penelitian di kantor bersama SAMSAT Kota Payakumbuh, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Meningkatkan serta mengoptimalkan sitem kerja pelayanan pada kantor bersama SAMSAT agar lebih baik.
2. Lebih intensif lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. SAMSAT Kota Payakumbuh diharapkan dapat lebih aktif lagi untuk berperan dalam mengelola sumber pendapatan daerah yang ada dalam wilayah kerjanya.

